

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan dalam melaksanakan operasinya membutuhkan modal kerja yang memadai sehingga memungkinkan perusahaan beroperasi dengan lancar. Modal kerja yang berlebihan maupun yang tidak mencukupi kebutuhan dapat menurunkan rentabilitas perusahaan.

Modal kerja yang lebih besar dari kebutuhan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan sebaliknya modal kerja yang lebih kecil dari kebutuhan akan mengakibatkan pelaksanaan operasional perusahaan berjalan tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu. Untuk mendapatkan modal kerja yang normal maka perusahaan harus mengelola modal kerja dengan memperhatikan keseimbangan unsur-unsur aktiva lancar terutama kas, piutang dan persediaan sebagai modal kerja dengan hutang lancar bila ditinjau dari segi likuiditas perusahaan.

Piutang dagang timbul karena perusahaan menjual produk atau jasa dengan sistem kredit. Penjualan kredit dilaksanakan dalam rangka memperbesar volume penjualan. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang, dan kemudian pada hari

jabuhnya pembayaran piutang tersebut barulah terjadi penerimaan kas. Pengaturan piutang ditujukan agar penerima kredit betul-betul dapat membayar hutangnya, sehingga tidak ada jumlah piutang yang tidak teragih dikarenakan penerima kredit tidak membayar. Untuk itu pengaturan piutang harus dilakukan baik sebelum piutang diberikan maupun sesudah piutang diberikan.

Adanya kebijaksanaan piutang baik dalam pengaturan sebelum piutang diberikan maupun sesudah piutang diberikan bertujuan agar dapat menentukan besarnya yang akan ditanggung perusahaan selubung dengan pemberian piutang tersebut karena hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas dan rentabilitas usaha.

PT. Pelaju Jaya Medan adalah perusahaan dagang yang bergerak dibidang distributor minyak pelumas. dimana penerimaan uang kas dari penjualan barang sering tertunda karena keterlambatan pelanggan dalam melunasi hutangnya, sehingga pihak manajemen mengalami keterlambatan dalam penyajian piutang dan sulit untuk mengambil keputusan.

Perusahaan tidak memisahkan fungsi pencatatan dengan dengan fungsi yang melakukan penerimaan kas sehingga sulit dilakukan pengontrolan pada buku kas yang menyebabkan terjadinya kesalahan dan peyelewengan sehingga perusahaan dapat mengalami kerugian.

Selain itu pendelegasian tugas dan wewenang kurang memadai dalam upaya menciptakan pengendalian internal sehingga kurang mendukung terhadap mekanisme sistem akuntansi pengawasan yang baik dan memadai.